

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti berhasil menjelaskan hipotesis dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran kategori persepsi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Aktivitas Pengendalian (X_2) dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y) tergolong sangat tinggi, sangat tinggi dan sangat tinggi dengan nilai kategori persepsi masing-masing 88,6%, 86% dan 87,6%.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Aktivitas Pengendalian (X_2) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y).
3. Variabel Penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah (X_1) dan Aktivitas Pengendalian (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y).
4. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Aktivitas Pengendalian (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y).

5. Hasil koefisien determinasi adalah 74,2% yang merupakan kontribusi dari tiga variabel bebas, yakni Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Aktivitas Pengendalian (X_2) dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Y), sedangkan sisanya yaitu 25,8% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat diluar penelitian ini.

6.2. Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut:

1. Variabel Aktivitas Pengendalian (X_2) memberikan pengaruh paling tinggi terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ($\beta_1=0,523$). Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memperhatikan dan berusaha untuk meningkatkan aktivitas pengendalian yang ada. Dengan cara mengikuti prosedur-prosedur dalam sistem pengendalian seperti: (1). Adanya pemisahan tugas atau fungsi yang memadai, yang berarti bahwa setiap tugas perlu diberikan sesuai dengan pemahaman para pegawai itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan tugas yang ada. (2). Otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas, yang berarti bahwa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari seorang pimpinan kepada bawahan namun harus disesuaikan dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan serta karyawan mana saja yang berhak menerima otorisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah serta membatasi ruang aktivitas yang dilaksanakan

serta para bawahan dalam melaksanakan aktivitas yang ada. (3). Dokumen dan catatan yang memadai, yang berarti perlu adanya dokumen dan catatan yang memadai serta sesuai yang membantu mendukung serta meyakinkan kegiatan yang akan dilaksanakan. (4). Pengendalian fisik atas aset dan catatan, yang berarti bahwa perlu adanya pengendalian langsung dalam hal ini adanya pembatasan atas aset dan catatan yang ada untuk menghindari adanya pencurian, serta (5). Verifikasi yang independen, yang berarti perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan sendiri oleh pemeritah terhadap aset maupun dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga harus selalu memperhatikan proses dalam pengendalian seperti: (1). Menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi kerja para karyawan, dalam hal ini standar yang dimaksud adalah adanya kriteria yang sederhana untuk sebuah prestasi, yaitu titik-titik yang terpilih dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda kepada pimpinan tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan itu tanpa perlu mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, (2). Melakukan pengukuran kerja, yang berarti pengukuran prestasi kerja idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu, (3). Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, yang berarti membandingkan hasil pengukuran dengan

target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi tersebut sesuai dengan standar, pimpinan akan menilai bahwa segala sesuatunya beda dalam kendali, dan (4). Mengambil tindakan korektif, yang berarti proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Apabila prestasi kerja diukur dalam standar, maka pembenaran penyimpangan yang terjadi dapat dipercepat, karena pimpinan sudah mengetahui dengan tepat, terhadap bagian mana dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan korektif itu harus dikenakan. Hal-hal tersebut dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) memberikan pengaruh paling tinggi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y) ($\beta_2=0,402$). Oleh sebab itu, dari pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terus meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang ada serta terus memiliki pemahaman yang baik tentang proses dalam akuntansi keuangan daerah itu sendiri seperti: (1). Proses pengumpulan data, (2). Pencatatan, (3). Pengiktisaran, dan (4). Pelaporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, serta prosedur-prosedur dalam mendukung sistem itu sendiri seperti: (1). Organisasi, (2). Dokumen sumber pembukuan, (3). Catatan, (4).

Prosedur-prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri, serta (5). Laporan keuangan. Hal tersebut guna meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam tentang pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengangkat objek penelitian instansi lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Pengantar Statistik untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis. Lengkap dengan Aplikasi SPSS*.
- Aliyah dkk. 2012. "Akuntabilitas Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan"
- Amelia, Lisa. 2013. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal".
- Afiah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta:Kencana.
- Aituarauw, A. I. W. Achmad. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". (Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemrintah Kota Bandung)
- Alma, Buchari. 2009. *Pengantar Statistik untuk Penelitian : Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Anonim, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampiannya.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

———, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Anonim, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung)*.

———, *BAB I Pengaruh Efektivitas Lingkungan Pengendalian Terhadap Pendekatan Indikasi Fraud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Karanganyar)*.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2016/2017. *Laporan Keuangan: Dasar Hukum*.

<https://aiglobal.or.id>, *Upaya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sektor Publik*

<http://monitor.co.id>. > *OPINI 2017 Peran SKPD dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang kredibel dan akuntabel*.

<https://www.kajianpustaka.com>. *Pengertian Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuangan*. Diakses pada hari Minggu, 6 Mei 2018.

<http://sucirakhmawati.wordpress.com/2014/10/25/laporan-keuangan>. Diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018.

<https://dwiermayanti.wordpress.com/2011/09/29/ketepatan-laporan-keuangan>. Diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018.

<https://eprintis.ums.ac.id>, *BAB I Pendahuluan. Masalah Akuntabilitas Keuangan*. Diakses pada hari Selasa, 26 Juni 2018.

<http://eprintis.ums.ac.id>, *BAB I Pendahuluan. Masalah Akuntabilitas Kinerja*. Diakses pada hari Selasa, 26 Juni 2018.

<http://repository.unpas.ac.id>, *BAB I Pendahuluan. “Pengaruh Faktor Keperluan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”*. (Survei pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar). Diakses pada 26 Juni 2018.

<https://id.m.wikipedia.org> > wiki > Opini Badan Pemeriksa Keuangan-Wikipedia bahasa Indonesia. Diakses pada hari Selasa, 21 Agustus 2018.

<http://kupang.tribunanews.com> > indeks-news Selasa, 14 Juni 2016-Post Kupang. BPK Perwakilan NTT Serahkan LPH Kepada Pemerintah Kota Kupang. Diakses pada hari Selasa, 21 Agustus 2018.

<http://kupang.bpk.go.id> > uploads > 2018/06. Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2017 Provinsi NTT. Diakses pada hari Rabu, 22 Agustus 2018.

<http://hjtfruity.blogspot.com> > 2017/5 Pengertian Pengendalian Menurut Para Ahli /TEORI PENDIDIKAN. Diakses pada hari Sabtu, 23 Februari 2019.

<http://repository.unpas.ac.id> > 2016. BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. Diakses pada hari Sabtu, 23 Februari 2019.

<http://www.spssindonesia.com> > 2014/02. Cara Melakukan Uji t Parsial dalam Analisis Regresi dengan SPSS – SPSS. Diakses pada hari Rabu, 27 Februari 2019.

Halim, A. 2008. Akuntansi Sektor Publik: *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kolo, Paula Diana. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang*”.

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Malut, Maria Goreti. 2010. *Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang*.

Mentari Modo, Sintike, Paul David, Saerang Elia & Tonya Poputra Agus “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)*”

Ompusunggu, Haloman. 2002. “*Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Internal Berbasis COSO dan Dampaknya Pada*

Pencegahan Kecurangan (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung”

Rihi Biha, Eka. 2013. *Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Aset Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.*

R. A. Bangngu, Marlin. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dearah.*

Solihin, Dadang, 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik.* Diakses pada Jumat 4 Mei 2018, <https://dadang.solihin.blogspot.com>

Soleha, Nurhayati, 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten.* Jurnal Akuntansi. Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sugiyono, 2011. *Statistik Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis.* Yogyakarta: CAPS.

Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.